

# Globalisasi dan Ekonomi Global: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?

*Timotius D. Harsono*

*Dalam era globalisasi, kekuatan ekonomi (economic power) suatu negara sangat menentukan posisi tawar dalam menggalang kerjasama internasional, bahkan akan lebih diperhitungkan lagi apabila negara tersebut memiliki posisi politik dan militer yang kuat. Ketiga unsur tersebut (ekonomi, politik dan militer) merupakan faktor yang saling mendukung dalam kerangka membangun hubungan dan kerjasama internasional.*

**N**egara-negara maju memiliki ketahanan ekonomi (*economic resilience*) yang kuat karena didukung dengan modalitas keuangan, kualitas SDM, kemampuan di bidang teknologi, dll. Namun negara-negara maju juga sangat berkepentingan untuk menggalang kerjasama dengan negara-negara berkembang agar mendapat akses terhadap pasar dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) serta tenaga kerja yang lebih kompetitif.

## 1. Globalisasi dan Ekonomi Global

Globalisasi (*globalization*) berimplikasi

pada meningkatnya koneksitas, integrasi dan interdependensi secara global di bidang ekonomi, sosial, teknologi, budaya, politik dan lingkungan hidup. Globalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses menyatunya berbagai sub-proses (seperti interdependensi ekonomi, meningkatnya pengaruh budaya, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, serta penyelenggaraan pemerintahan dan tantangan geo-politik) yang semakin menyatukan masyarakat dunia dan ruang hidup sehingga semakin erat hubungannya dalam proses menjadi suatu sistem global. Salah satu contoh globalisasi adalah sarana telekomunikasi (telepon). Walaupun globalisasi bukan merupakan fenomena baru, namun dalam perkembangannya mengalami percepatan yang luar biasa dengan adanya penerapan teknologi baru, khususnya teknologi Informasi dan Telekomunikasi.

Proses globalisasi terus berkembang ke arah berintegrasinya berbagai perekonomian dan masyarakat dunia, dan merupakan kecenderungan dunia usaha, teknologi atau pandangan hidup yang menyebar luas ke seluruh dunia, atau suatu proses untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Apakah keberadaan dan perkembangan globalisasi akan menguntungkan seluruh masyarakat dunia? Hal ini masih menjadi perdebatan antara pihak yang mendukung globalisasi (proponen) dan pihak yang menentang globalisasi (oponen). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkurangnya angka kemiskinan di China, India dan beberapa negara berkembang lainnya selama 20 tahun terakhir merupakan dampak positif dari proses globalisasi. Namun, sebagian masyarakat internasional bersikap oposisi terhadap globalisasi karena beranggapan bahwa globalisasi telah memperbesar kesenjangan dan kerusakan lingkungan hidup. Para proponen yakin bahwa globalisasi memiliki potensi menciptakan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi secara global, sehingga menciptakan manfaat bagi negara-negara maju dengan parameter kompetisi secara lebih adil (*playing field* yang sama). Sedangkan para oponen globalisasi meyakini bahwa globalisasi hanya akan meningkatkan peluang bagi negara-negara yang sudah kaya dan maju untuk memanfaatkan negara-negara yang lebih miskin. Lebih jauh lagi, bahkan globalisasi dikuatirkan dapat menghilangkan keberagaman regional, menuju

kepada budaya global yang lebih homogen.

Selama berabad-abad, bangsa-bangsa di dunia secara progresif telah menjalin hubungan, namun akhir-akhir ini hubungan antar bangsa/manusia mengalami percepatan dengan intensitas yang luar biasa. Percepatan tersebut didukung dengan sarana dan prasarana, antara lain: transportasi udara, transportasi laut dengan kapasitas besar, jasa pelayanan telepon yang murah, *e-mail*, komputer, aliran modal yang bersifat instan, kesemuanya ini telah membuat dunia semakin saling inter-dependen.

Ekonomi global (mengandung pengertian globalitas), ditandai dengan pasar yang secara total berhubungan, tidak dibatasi oleh waktu dan batas-batas negara. Keberadaan rumah makan McDonald's di seluruh dunia merupakan contoh dari globalisasi. Fakta bahwa menu yang disajikan telah disesuaikan dengan selera pasar lokal merupakan contoh globalisasi atau juga dikenal sebagai internasionalisasi (*internationalization*) yang merupakan perpaduan antara *globalization* dan *localization*.

Berbagai perusahaan multi-nasional

memproduksi barang-barang di berbagai negara lain dan menjual produknya ke konsumen di seluruh dunia, sehingga uang, teknologi dan bahan baku mentah (sebagai komoditas) diperdagangkan antar negara. Bersamaan dengan produk dan jasa keuangan, berbagai gagasan (*ide*) dan budaya bangsa-bangsa secara bebas telah saling mempengaruhi. Sebagai akibatnya, hukum, perekonomian dan gerakan sosial terbentuk pada tingkat internasional. Begitu banyak para elite politik, akademisi dan jurnalis memandang hal ini sebagai suatu kondisi yang tidak bisa dihindari (*inevitable*). Namun, sebagian masyarakat dunia berpendapat bahwa ekonomi global merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat dan budaya mereka. Bahkan gerakan yang memperjuangkan keadilan sosial (*social justice movement*) yang merupakan *resultante* dari proses globalisasi, menawarkan cara alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Perdebatan politik secara intensif terhadap arti dan arah globalisasi akan terus berlanjut.

Dari perspektif ekonomi, globalisasi merupakan konvergen dari elemen harga, produk, upah, bunga dan keuntungan berdasarkan norma-norma

yang diterapkan di negara maju. Globalisasi di bidang ekonomi sangat tergantung pada peran: perpindahan penduduk, perdagangan internasional, arus modal internasional dan percepatan pemanfaatan teknologi. Perkembangan ke arah ekonomi global yang terpadu, ditandai khususnya dengan perdagangan bebas, aliran modal secara bebas dan pemanfaatan tenaga kerja asing yang lebih murah dan produktif.

Globalisasi memiliki berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan dunia melalui berbagai cara, sebagai berikut:

- Aspek industri (*transnasionalization*) – munculnya pasar produksi di seluruh dunia dan akses yang lebih luas terhadap jenis barang untuk konsumen dan perusahaan;
- Aspek keuangan – muncul dan berkembangnya pasar uang di seluruh dunia dan akses pinjaman luar negeri bagi perusahaan dan negara;
- Aspek ekonomi – diberlakukannya pasar bebas, berdasarkan kebebasan pertukaran barang dan modal;
- Aspek politik – globalisasi politik yang diciptakan bersama untuk mengatur hubungan di antara negara-negara dan menjamin hak-hak yang muncul dari proses globalisasi sosial dan ekonomi;
- Aspek informasi – meningkatnya arus informasi dari/ke daerah-daerah terpencil;
- Aspek budaya – berkembangnya hubungan silang budaya (*cross culture*) yang mendorong “menyatunya” budaya, keinginan untuk memakai dan menikmati produk dan gagasan (ide) bangsa lain, mengadopsi teknologi baru dan ikut serta berpartisipasi dalam suatu “budaya dunia”;
- Aspek ekologi – menghadapi tantangan global terhadap lingkungan hidup yang tidak mungkin dipecahkan tanpa kerjasama internasional, seperti perubahan iklim global, polusi air dan udara lintas batas negara, pengambilan ikan secara berlebihan dan menyebarnya spesies yang invasif terhadap spesies lain;
- Aspek sosial – mendorong interaksi antar masyarakat dari semua

bangsa yang mendorong terjadinya proses pertukaran budaya (multi-kultural); meluasnya migrasi (legal maupun ilegal); meluasnya produk-produk konsumen lokal (seperti: makanan dan pakaian) ke negara lain (yang sering disesuaikan dengan budaya setempat); kompetisi olah raga tingkat dunia (FIFA *World Cup* dan *Olympic Games*); Formasi atau berkembangnya nilai-nilai universal;

- Aspek teknis/legal – pengembangan infrastruktur telekomunikasi global dan aliran data *transborder* yang lebih luas dengan menggunakan teknologi seperti internet, komunikasi dengan satelit, kabel serat optik bawah laut, dan *wireless telephones*; berkembangnya standar-difikasi yang diterapkan secara global seperti hukum *copyright*, *patents* dan kesepakatan perdagangan global; dorongan dari komunitas advokat untuk dibentuk pengadilan kriminal internasional dan adanya gerakan keadilan internasional (*international justice movement*).

Sejak perang dunia ke-2, batasan-batasan terhadap perdagangan internasional telah banyak dikurangi/di-

tiadakan melalui kesepakatan internasional – *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Inisiatif-inisiatif khusus dilakukan sebagai implikasi GATT dan WTO (*World Trade Organization*), di mana GATT merupakan landasan, antara lain: dipromosikannya perdagangan bebas; pengurangan atau penghapusan tarif; pembangunan zona perdagangan bebas dengan tarif kecil atau tidak ada tarif sama sekali; pengurangan biaya transport, khususnya kontainer untuk transportasi laut; pengurangan atau penghapusan pengendalian modal; pengurangan, penghapusan atau harmonisasi subsidi untuk usaha lokal; harmonisasi hak intelektual di sebagian besar negara-negara dengan pembatasannya; pengakuan supranasional terhadap pembatasan hak intelektual (seperti: hak paten yang dikeluarkan oleh China dapat diakui di Amerika Serikat).

Dari uraian di atas, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses internasionalisasi berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan berbagai negara.

2. Beberapa aspek penting tentang ekonomi global yang perlu menjadi perhatian bagi negara-negara

ra berkembang dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi kendala/ ancaman adalah sebagai berikut:

a. *Dinamika dan pertumbuhan ekonomi global (peluang).*

Pada dasarnya, dinamika ekonomi global dipengaruhi oleh perkembangan di bidang kependudukan, arus modal, Sumber Kekayaan Alam (SKA), Ilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek), keamanan dan kebijakan negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi.

- Saat ini kondisi makro ekonomi global membaik, sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum akan meningkatkan daya beli masyarakat internasional (*peluang pasar*).
- Peningkatan investasi dan perdagangan internasional dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur dan investasi di sektor-sektor strategis.
- Keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi di segala bidang pembangunan akan meningkatkan daya saing suatu negara.

Dinamika sektor riil akan menggerakkan pasar dan pertumbuhan ekonomi.

b. *Kesenjangan ekonomi antar negara (tantangan).*

Fenomena ekonomi global merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Khususnya bagi negara-negara berkembang yang sebagian besar belum siap menghadapi persaingan dalam pasar dan perdagangan bebas, maka persaingan global lebih merupakan tantangan dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi negara yang tidak mampu memanfaatkan peluang pasar dan perdagangan bebas. Salah satu upaya untuk memanfaatkan peluang pasar dan perdagangan bebas adalah membangun struktur industri nasional dengan dukungan keunggulan komparatif dan potensi pasar dalam negeri untuk membangun kemampuan dalam menghadapi persaingan global. Di samping itu, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (*good governance*) menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi dan lingkungan usaha yang kondusif.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi global juga berpotensi men-

ciptakan kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Di sisi lain, meningkatnya konflik internal dan regional akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, yang pada gilirannya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global.

*c. Krisis dan ketahanan ekonomi (ancaman).*

Sepuluh tahun yang lalu (2 Juli 1997), Bank Sentral Thailand mengubah kebijakan moneter dengan mengembangkan nilai tukar mata uangnya setelah gagal melindungi mata uang Bath dari "serangan" spekulasi. Langkah Bank Sentral Thailand tersebut telah memicu terjadinya krisis keuangan dan ekonomi di Thailand yang dengan cepat merebak menjadi krisis ekonomi di negara-negara kawasan Asia. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan kontraksi pertumbuhan GDP, bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang mengambil posisi terhadap pinjaman dalam mata uang asing, dan akhirnya negara-negara yang terkena dampak krisis ekonomi harus menanggung malu dengan meminta bantuan IMF. Dari pengalaman yang dialami oleh negara-negara di Asia yang terkena imbas

krisis ekonomi tahun 1997-1998, maka dalam 10 tahun terakhir ini negara-negara di kawasan Asia telah menetapkan kebijakan dan arah yang berbeda. Pelajaran apa yang dapat kita ambil, dan bagaimana negara-negara di kawasan Asia berubah dalam satu dasawarsa terakhir? Krisis keuangan tersebut dapat digambarkan sebagai "badai besar": yaitu bertemu dan bergabungnya berbagai kondisi yang tidak hanya mengakibatkan turbulensi keuangan dan ekonomi, namun juga dengan sendirinya menciptakan dampak yang lebih luas yang lebih kompleks dan bersifat multidimensi. Salah satu kondisi yang tampak menonjol adalah diterapkannya sistem nilai tukar *fixed* dan *semi-fixed* seperti di Thailand, Indonesia dan Korea Selatan; defisit anggaran yang menyebabkan tekanan pada negara-negara yang mengalami krisis telah dimanfaatkan oleh para spekulasi untuk "menyerang" mata uang negara-negara tersebut; dan kebijakan suku bunga yang tinggi justru mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengambil pinjaman dari luar negeri dalam mata uang asing (dengan bunga yang lebih rendah) untuk mendanai investasi yang tidak disupervisi dengan baik. Sistem pengawasan pinjaman dalam

negeri yang lemah, yang dalam beberapa hal justru meningkatkan hutang swasta, juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya krisis dan mendorong terjadinya akibat ikutan yang lebih buruk.

Di samping adanya faktor kebijakan terhadap nilai tukar yang telah mendorong terjadinya krisis, yang lebih menjadi penyebab terjadinya krisis adalah pinjaman dalam mata uang asing yang berlebihan dan sistem pengawasan yang lemah. Sehingga pada saat "diserang" spekulasi dan otoritas moneter tidak sanggup "menahan" lagi, maka dikeluarkanlah kebijakan untuk melepas atau mengembangkan nilai tukar *bath*, *won*, dan *rupiah* terhadap dollar AS. Sebagai contoh, dari nilai tukar rata-rata satu dollar AS: Rp. 2.342 pada tahun 1996, telah jatuh menjadi (rata-rata) Rp. 10.014 pada tahun 1998, sehingga perusahaan-perusahaan yang pada saat itu meminjam dalam mata uang asing tidak mampu lagi mengembalikan hutangnya. Kondisi seperti ini mendorong terjadinya kepanikan yang menyebabkan larinya modal ke luar negeri sehingga membawa masalah yang lebih besar bagi perbankan, perusahaan dan masyarakat luas. Akhirnya, penyelesaian ter-

hadap kredit macet dan penjualan aset-aset perusahaan harus dilakukan sebagai dampak dari krisis, merupakan pekerjaan berat yang harus ditangani oleh pengambil kebijakan pada tahun-tahun setelahnya.

Saat ini negara-negara di kawasan Asia memiliki cadangan devisa yang jauh lebih besar, sehingga secara teori, masing-masing negara seharusnya mampu melindungi nilai mata uangnya dari "serangan" spekulasi. Bahkan para pelaku ekonomi berpendapat bahwa negara-negara di Asia sudah terlalu jauh mengambil arah yang berlawanan dengan kondisi tahun 1997-1998 (yaitu dengan membangun cadangan devisa secara berlebihan). Reformasi di sektor keuangan telah dilakukan dan angka kredit macet atau *Non-Performing Loan (NPL)* di sektor perbankan Indonesia saat ini sudah jauh lebih kecil. Secara fundamental kawasan Asia tidak lagi kondusif bagi para spekulasi mata uang dan sistem pengawasan saat ini sudah jauh lebih baik. Dengan demikian, bilamana "tekanan" permintaan mata uang asing seperti tahun 1997 terjadi lagi, maka tidak akan dengan mudah mengakibatkan terjadinya krisis serupa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kawasan Asia

bebas dari resiko dalam membangun perekonomiannya. Ketidakseimbangan dan permasalahan baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, antara lain disebabkan oleh terjadinya defisit anggaran di Amerika Serikat dan besarnya jumlah cadangan dalam mata uang AS oleh bank-bank sentral di kawasan Asia. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan dalam menghadapi potensi resiko dan tantangan baru.

Dalam ekonomi global, krisis ekonomi sangat mungkin terjadi lagi, karena turbulensi dalam perekonomian suatu negara/kawasan (terutama di negara yang memiliki ekonomi besar) akan berdampak pada negara-negara lain, khususnya negara berkembang. Pada saat terjadinya krisis ekonomi (1998), Indonesia mengalami dampak yang paling berat. Sebagai gambaran, hal ini dapat dilihat dari perbandingan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1997: US\$ 216.000 juta dan tahun 1998: merosot menjadi US\$ 101.000 juta dengan beban hutang nasional (pemerintah dan swasta) saat itu sekitar US\$ 130.000 juta. Dalam perkembangannya, pada tahun 2002 PDB Indonesia telah meningkat menjadi US\$ 173.000 juta dan pada tahun

2006 meningkat menjadi US\$ 364.000 juta. Namun terjadinya kontraksi ekonomi yang sangat signifikan pada tahun 1998 (18,2%) telah menciptakan pengangguran besar-besaran secara mendadak, sehingga krisis ekonomi di Indonesia dengan sangat cepat telah berkembang menjadi krisis yang bersifat multi-dimensional. Krisis ekonomi tersebut telah menjadi pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk secara bertahap membangun daya saing nasional agar dapat memanfaatkan peluang pasar global yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sehingga dapat menjadi bangsa yang lebih mandiri. Indonesia perlu membangun ketahanan ekonominya agar mampu menghadapi pengaruh perubahan dan meredam guncangan ekonomi yang datang dari luar. Dengan demikian, apabila krisis terjadi lagi maka dampak negatif dapat diminimalisasi.

Globalisasi dan ekonomi global merupakan suatu kondisi yang saat ini harus dihadapi oleh negara-negara mana pun, termasuk Indonesia. Memperhatikan perkembangan negara-negara lain seperti: China, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, dll., ada

beberapa faktor dominan yang mendasari keberhasilan pembangunan negara-negara tersebut, antara lain: penegakan hukum, stabilitas politik dan keamanan (untuk menjamin kepastian usaha), *good governance* (untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing usaha), program pendidikan dan kesehatan masyarakat (untuk meningkatkan kualitas SDM) serta pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang konsisten dan konsekuen.

Peningkatan daya saing nasional perlu didukung dengan lingkungan usaha yang kondusif, efisien dan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif. Kondisi lingkungan usaha yang diharapkan tersebut mutlak membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum yang baik. Di samping itu, peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan melalui program pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan serta pelaksanaan pembangunan ekonomi di sektor-sektor strategis, antara lain di sektor infrastruktur, industri, pertanian/perikanan, dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya nasional serta melibatkan seluruh komponen bangsa dan masyarakat luas.

3. Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang/tantangan/ancaman dalam membangun daya saing nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Kondisi makro ekonomi global yang membaik telah mendorong aliran investasi ke negara-negara tertentu di Asia (China, India, dll.). Pada 15 tahun terakhir, China mengalami pertumbuhan yang tinggi dan konsisten ( $\pm 10\%$  per tahun). Hal ini terjadi antara lain karena China (dan India) memiliki keunggulan kompetitif di bidang industri manufaktur dan berhasil menarik *Foreign Direct Investment (FDI)*. Pada tahun 2005, hutang nasional negara China sekitar US\$ 318.000 juta dan berhasil dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2007, cadangan devisa RRC sudah melampaui US\$ 1,2 Triliun. Dalam hal FDI, Indonesia bersaing dengan China, India dan negara-negara di ASEAN lainnya. Untuk itu, perlu adanya upaya agar sebagian potensi FDI (yang secara nyata telah mendorong pertumbuhan China dan India) juga mengalir ke Indonesia. Stabilitas politik, ekonomi

dan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta penegakan hukum merupakan faktor-faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik FDI. Langkah-langkah pemerintah dalam rangka penegakan hukum untuk mengatasi korupsi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif akan selalu direspons positif oleh investor.

- Pembangunan nasional tidak hanya berbasis pada pembangunan sektoral, tetapi juga harus berorientasi pada pembangunan yang berorientasi kewilayahan. Hal ini dimungkinkan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang RI no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun pelaksanaan otonomi daerah mutlak harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional (Undang-Undang RI no. 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025) berdasarkan *platform geo-strategi Indonesia*.

- Indonesia memiliki SKA yang cukup besar dan beragam, saat ini menjadi salah satu negara pengekspor sumber daya alam terbesar, antara lain: LNG, batubara, CPO, timah dan pulp. Daya saing nasional dapat ditingkatkan bilamana pemanfaatan SKA dilakukan secara terbatas dan strategis. Artinya, SKA dimanfaatkan untuk diproses di dalam negeri sehingga dapat mendukung penciptaan industri hilir. Dengan demikian, produk industri pengolahan dan industri manufaktur akan dapat bersaing untuk diekspor ke luar negeri. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang terarah dan jelas tentang sektor SKA untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan memperkuat industri manufaktur di dalam negeri.
- Kebijakan nasional untuk mendorong investasi guna mendukung berkembangnya industri strategis, antara lain di bidang pertanian dan perikanan serta energi (*khususnya energi non-renewable*) dan pemba-

ngunan infrastruktur akan menciptakan *multiplier effect* dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, memperkuat struktur industri nasional dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kemandirian bangsa.

- Saat ini pengembangan industri pengolahan (*processing*) dan industri manufaktur (*manufacturing*) terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan ketidakpastian usaha, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya logistik produk industri pengolahan dan manufaktur di Indonesia mencapai 14,08%, jauh melampaui Jepang yang hanya 4,88% (sumber data LPM-UI). Di samping itu, tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada umumnya masih rendah.

- Peningkatan kualitas SDM dan pembangunan fasilitas infrastruktur secara bertahap, terprogram dan terpadu akan meningkatkan daya saing industri nasional.

- Kemajuan Iptek yang telah dimanfaatkan dalam pembangunan di China, India dan negara-negara

ASEAN seharusnya menjadi pendorong bagi Indonesia untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan daya saing nasional. Bila bangsa Indonesia tidak mampu memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM, maka akan semakin tertinggal jauh oleh negara-negara tersebut.

#### 4. Penutup

- a. Indonesia telah masuk dalam era globalisasi yang syarat dengan persaingan pada tingkat negara, pemerintahan, perusahaan dan individu. Pada hakekatnya, dalam membangun daya saing mutlak diperlukan lingkungan usaha yang kondusif untuk memberikan jaminan kepastian usaha berdasarkan hukum. Peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam hal ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi yang besar melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan efektif akan mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik sehingga memberikan jaminan kepastian bagi siapapun untuk meningkatkan produktivitas lem-

- baga/institusi (pemerintah maupun swasta) dan produktifitas individu. Kondisi seperti ini merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi dan pasar global sebagai peluang.
- b. Secara umum, daya saing nasional Indonesia saat ini masih lemah, sehingga persaingan dalam pasar global melalui perdagangan bebas masih cenderung sebagai tantangan dari pada peluang. Hal ini nampak dari banyaknya produk-produk impor (meskipun sudah bisa diproduksi di dalam negeri) yang masuk dan dibeli oleh masyarakat Indonesia. Sesungguhnya pasar dalam negeri merupakan peluang nyata yang mutlak harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat proses strukturisasi industri nasional. Oleh karenanya, budaya "cinta produk dalam negeri" perlu ditumbuhkan untuk membentuk
- permintaan (*demand*) bagi produk dalam negeri dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Budaya "cinta produk dalam negeri" harus dipelopori oleh sektor pemerintah dilandasi pemikiran bahwa dengan membeli produk dalam negeri akan mendukung proses penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri.
- c. Bilamana bangsa Indonesia gagal dalam menyikapi kondisi seperti ini (lemahnya daya saing) secara kohesif, maka bangsa Indonesia akan semakin kehilangan peluang dan tertinggal lebih jauh oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya tantangan dalam menghadapi persaingan global dapat berkembang menjadi hambatan bagi pembangunan nasional dan pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. □